

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang relatif muda, yang bermakna masih dalam proses mencari bentuk sistem pemerintahan yang paling baik, dan paling tepat bagi kehidupan rakyatnya, yang terus bergerak semakin maju. Sejalan dengan kenyataan, dan gambaran perilaku organisasi polisi dalam kenegaraan yang masih bergerak cepat menuju pencarian model kenegaraan yang tepat itu, maka perilaku organisasi Polri juga masih terus berproses bahkan mengenal pasang surut yang sangat tajam. Pendekatan sejarah Polri sangat terkait dengan perilaku organisasinya akan menggambarkan secara gamblang, perubahan-perubahan kenegaraan dan pemerintahan, yang berpengaruh langsung pada eksistensi Polri dengan perilaku organisasinya.

Organisasi Polri adalah bagian dari organisasi pemerintahan. Dengan demikian, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya. Diseluruh dunia, organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada departement dalam negeri, ada yang membawah pada departement kehakiman, ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden bahkan dikendalikan oleh Presiden sendiri, ada yang merupakan departement yang berdiri sendiri.

Bentuk organisasi yang diwujudkan dengan ketentuan-ketentuan tentang struktur organisasi dan prosedurnya, selalu dimaksudkan sebagai arah dan

aturan permainan (*rule of the game*) dari upaya-upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian juga organisasi Polri yang terus dan selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini memang bertujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi optimal dalam melandasi pelaksanaan tugas Polri. Organisasi sebenarnya hanyalah merupakan sarana dan wahana kegiatan untuk mencapai tujuan. Karenanya eksistensi organisasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik yang berupa lingkup ruang, waktu, tantangan dan situasi. Organisasi yang baik berarti harus memenuhi persyaratan, serasi dan sesuai dengan unsur-unsur lingkungan tersebut. Jika berubahnya pola fikir masyarakat tradisional menjadi pola fikir masyarakat industri, akan mendorong dan mengharuskan perubahan organisasi. Akan tetapi perubahan itu harus dikaji dengan seksama teliti dan sungguh-sungguh agar sesuai dengan tuntutan lingkungan¹.

Seperti yang diungkapkan oleh Slamet Wiyadi Atmo Sudarmo, bahwa pengertian organisasi mengandung 3 unsur :²

1. Suatu bentuk himpunan orang untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Suatu pola struktural untuk meletakkan wewenang dan tanggung jawab di dalam himpunan tersebut.
3. Perumusan tugas-tugas atau kewajiban dari orang yang tergabung dalam himpunan, dengan suatu sistem agar dapat mencapai tujuan secara efisien.

Ketiga unsur di atas dapat dirumuskan bahwa organisasi adalah suatu sistem sosial yang memiliki aktivitas terintegrasi dengan tujuan yang terkalkulasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Polri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :³

1. Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-undang dan sebagainya).
2. Polisi adalah anggota Badan Pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).

Dalam proses negara yang semakin demokratis, menunjukkan arah perilaku organisasi Kepolisian yang semakin modern, semakin menghormati dan menegakkan HAM. Modernisasi Kepolisian dan demokratisasi negara adalah dua hal yang saling berpengaruh bahkan saling membutuhkan. Karena modernisasi dalam kepolisian dan pemuliaan HAM serta demokratisasi dapat digambarkan sebagai tolak ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan dalam suatu negara atau bangsa yang artinya perubahan perilaku organisasi polisi yang semakin demokratis dan semakin berbudaya HAM merupakan gambaran semakin majunya peradaban dan keberhasilan pembangunannya.⁴

Di tengah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta menguatnya arus globalisasi yang tidak terbendung pada masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3 (Depdiknas,2002) hal. 886.

⁴ Meuthia, G. Rochman cs, *HAM Sebagai Parameter Pembangunan* (Jakarta :ELSAM ,1997) hal.7- 12.

luas sebagai kota budaya dan pendidikan, karena itu kota Yogyakarta yang kita cintai ini merupakan patokan standarisasi daripada aktivitas rakyatnya untuk berbagai kota di Indonesia. Selain sebagai kota budaya, Yogyakarta juga mempunyai beberapa obyek wisata seperti Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kotagede yang terkenal dengan industri peraknya yang sudah terkenal diseluruh dunia maka banyak wisatawan baik domestik maupun manca negara berdatangan untuk menyaksikan secara lebih dekat hasil kerajinan perak di Kotagede, candi prambanan yang terletak dikota Sleman, dan wisata-wisata lainnya yang ada disekitar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dengan gelar yang disandang oleh kota Yogyakarta ini kita wajib untuk menjaga dari berbagai gangguan ketentraman dari orang yang berusaha untuk mencoreng nama baik kota yang terkenal berhati nyaman, maka Sosok Polri dengan berbagai atribut dan sarana pendukungnya sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, merupakan narasumber kamtibmas, sebagai sumber informasi, sumber yang menjadi tempat bertanya bagi masyarakat yang semakin kritis tersebut, Polri dituntut untuk mampu menghadirkan kualitas dirinya sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional dan proposional. Sebagai pengemban misi kamtibmas, maka setiap anggota Polri harus mampu mengintegrasikan fisik, mental dan intelegensinya dengan mantap menghadapi tantangan masa depan.

Dalam sejarah Polri ada dua momentum reformasi penting yaitu dinamakan "reformasi 1956" dan "reformasi 1999" Kedua reformasi tersebut

pada hakekatnya dapat dilihat sebagai pencarian ruang kebebasan, yang pertama pada tanggal 1 Juli 1956, Kepolisian Indonesia dikeluarkan dari kementerian dalam negeri dan ditempatkan pada kantor Perdana Menteri. Sejak itu tanggal tersebut diperingati sebagai hari kelahiran Polri, maka ia boleh menjadi bukti tentang kehadiran dari psikologi kebebasan tersebut diatas. Pembebasan penting yang kedua adalah saat Polri dipisahkan dari ABRI mulai 1 April 1999. Kedua momentum itu adalah bebasnya Polri atau otonom pada Polri. Pemisahan dan pengaturan peran TNI dan Polri sebagaimana dalam TAP MPR No. VI/MPR/2000 menjadikan Polri harus menjadi profesional. Sebagaimana tuntutan masyarakat yang terus semakin berkembang, maka profesionalisme Polri dicapai bukan hanya pada penguasaan teknis Kepolisian semata, namun dapat memahami lingkungan disekitarnya sebagai dasar dalam melaksanakan tugas seiring dengan visi dan misi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum.⁵

Dengan kedudukannya sebagai agen perubahan sosial, Polisi dituntut untuk selalu bertingkah laku profesional. Perlakuan tidak beradab yang diterima oleh jajaran Polri bukan alasan yang menoleransi tindakan tak beradab atas warga. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan, untuk mengatasinya ada 5 hal yang harus dilakukan polri :⁶

1. Melanjutkan sosialisasi internal tentang paradigma baru Kepolisian, khususnya berkenaan dengan internalisasi karakter civil ini, dengan terus

menerus menekankan kepada setiap individu Polisi bahwa institusi Polri adalah milik masyarakat (publik) kepada siapa mereka harus mengabdikan.

2. Mempertegas prosedur standar yang sudah ada, sehingga anggota kepolisian benar-benar memahami dengan pasti kapan dan bagaimana kekerasan/kekuatan hanya jika diperlukan dapat digunakan.
3. Melanjutkan penataan kembali sistem pendidikan Polri, sehingga tidak hanya menyangkut aspek kurikulum, termasuk pembinaan aspek moral dan pengendalian diri.
4. Disamping melalui proses pendidikan pengembangan sumber daya manusia khususnya pembentukan keterampilan dan pembinaan kepribadian perlu diikuti juga dengan proses pelatihan secara reguler.
5. Penyusunan mekanisme pengawasan eksternal yang bersifat lokal, dalam hal ini, masyarakat tidak hanya berpeluang mengajukan laporan atau pengaduan dan keluhan seperti yang berjalan, tetapi juga mempunyai akses untuk mengetahui tindak lanjut dan penyelesaian atas laporan atau pengaduan tersebut.

Artikel-artikel seperti "komplotan curanmor beraksi lagi di Sleman" bukanlah sekedar kebetulan belaka jika dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 17 September 2005. Seluruh peristiwa di atas melibatkan dan memerlukan kehadiran serta menjadi urusan Polisi, karena berkenaan dengan proses penegakan hukum maupun penjagaan keamanan masyarakat. Jika dicermati secara seksama, cuplikan peristiwa tersebut hanyalah sederet aktivitas masyarakat yang terjadi di Yogyakarta dalam tempo satu hari

Namun demikian deretan peristiwa sehari tersebut cukup menunjukkan bahwa hukum seakan dianggap non eksisten oleh masyarakat bahkan oleh Polisi sendiri dengan membiarkan terjadinya pelanggaran tanpa dilakukan penindakan. Kondisi masyarakat seperti ini maka kita disinyalir merupakan bangsa yang masih diwarnai oleh adanya pengabaian dan ketidakhormatan atas hukum (*disregarding and disrespecting law*) yang sekaligus diakibatkan dan mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap hukum (*distroosting law*). Dalam berbagai peristiwa baik tindak pidana maupun perubahan sosial masyarakat, maka Kepolisian merupakan lembaga (institusi, individu maupun kegiatan), Pertama yang langsung harus mengurus dan berhadapan dengan masyarakat, baik sebagai korban, saksi maupun tersangka. Oleh karenanya jelaslah bahwa Kepolisian merupakan simbol adanya hukum yang mempunyai tugas menjaga keamanan dalam negeri dan penegak hukum, mengalami pula derita pengabaian, tidak dihormati dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Berbagai urusan seperti perusakan terhadap fasilitas fisik seperti kantor, rumah, kendaraan, kafe dan puncaknya sampai pada pembunuhan tersangka terjadi terus menerus di berbagai wilayah. Hal ini muncul akibat ketidakpuasaan oknum anggota masyarakat yang menganggap bahwasannya prosedur hukum terlalu lama, bertele-tele dan *subject to negotiation*, sehingga mereka menjustifikasi aksinya dan *taking the law into their own hands*. Sebagai salah satu bentuk *self help action* karena mereka menganggap bahwa hukum tidak memberikan keadilan yang mereka harapkan.⁷

7. J. J. van Dijk, "The Role of the Police in the Netherlands" *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 90, Number 2, 1999, p. 141.

Dalam situasi apapun Polisi selalu muncul dan semuanya menjadi urusan Polisi, maka sangatlah mudah untuk melakukan komfilasi atas laporan dalam media massa mengenai jasa-jasa dan dosa-dosa Polisi, baik yang sekedar dipersepsi maupun yang aktual. Diakui maupun tidak media massa memang belum imbang memberi *Reward* (penghargaan) dan *Punishment* (hukuman) sehingga tidak terlalu sering mengungkapkan sisi positif dari Polisi, sehingga menciptakan adagium sendiri yang dipandang masyarakat mempunyai ” *Jasa yang tak terhimpun, dosa tidak berampun.*” Polri berada di bawah pengaruh kultur politik yang terbentuk oleh UU No.13 Tahun. 1961, UU No.28 Tahun 1997, dan UU No. 2 Tahun 2002. Hal tersebut dikarenakan kultur politik selama orde baru yang bercirikan pada sentralisasi kekuasaan, padahal watak dasar tugas dan wewenang Polri itu adalah tegaknya hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan bukan melindungi kewibawaan akan kekuasaan seorang penguasa. Polri menjalankan tugas Undang-Undang yang sekaligus membelenggu kemandiriannya memerankan tugas institusional sehingga Polri tidak leluasa mengaplikasikan mandat dan kehendak rakyat yang menurut Polri bertindak di semua urusan dan berpihak pada rakyat. Jadi, perlu ada perubahan paradigma nilai dan perangkat sistem Undang-undang agar Polri bisa berperan sesuai dengan hakikat keberadaannya yang serba urusan.⁸

Polisi berada dan bekerja di dalam suatu habitat tertentu, bagaikan ikan dengan airnya dimana Polisi berada dalam suatu masyarakat untuk dapat

menyesuaikan dalam kebudayaan di lingkungan tempatnya bertugas. Polisi sendiri memiliki kebudayaan yang tercemin melalui beberapa tanda khusus, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Jacob Chwast :

*“The Uniform, Ceremonials, Etiquette, Power and Authority , An Unique Set of Duties, Strongkinship, and Solidarity among Policemen, A Sense of Isolation from the Rest of the Community and Other Occupation, and Danger That Are Shared by All Police Office. Jadi, adanya pakaian seragam seremonial, etiket, kekuasaan serta otoritas dan lain sebagainya yang dimiliki oleh polisi memberi ciri khas kepada organisasi kepolisian sesuatu kekuatan psikologis, yang menarik, sehingga dengan itu para anggota kepolisian menerima dan memperkenalkan budaya polisi”.*⁹

Pendapat yang sama memperkuat argumentasi perihal sub kultur budaya Polisi tersebut disampaikan pula oleh Gubernur PTIK, Irjen Pol. Prof. DR. Farouk Muhammad. Dikemukakan bahwa Polisi merupakan anggota dari sub kultur dalam tubuh Kepolisian yang menjadi sistem normatik dari suatu kelompok khusus dalam masyarakat dan secara essensial berbeda dengan kultur dominan dalam masyarakat umum. Kebiasaan tingkah laku terlatih dan “correct” dalam Korps Kepolisian dan cara-cara khusus dalam bertindak dan berfikir, senantiasa berinteraksi dengan sistem kultur yang berada dalam masyarakat, terutama dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan otoritas oleh Undang-Undang. Sementara itu, James A. Inciardi menerangkan bahwa nilai-nilai dan tingkah laku yang ada dalam Korps Kepolisian merupakan sosialisasi dari pola-pola yang diberikan oleh Polisi terlatih terutama selama dalam pendidikan dan latihan.¹⁰

Kepolisian sebagai ujung tombak pengawal dan agen terhadap setiap perubahan masyarakat memang tengah mengalami masa yang paling sulit pada saat ini. Kondisi ini mempengaruhi Polisi dimanapun di dunia, yang sangat peka terhadap perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat segera menyentuh jantung pekerjaan Kepolisian. Polisi di dunia saat ini menghadapi kenyataan dan tantangan, bahwa ia harus bekerja dalam suatu lingkungan yang sadar demokrasi. Sistem otoriter pelan-pelan menjadi barang masa lalu yang harus segera ditinggalkan dan digantikan dengan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan yang demokrasi dan manusiawi.

Berangkat dari teori Boston bahwa Kepolisian hanyalah cerminan dari masyarakat, Polisi tidak bisa bersih kalau sistem sosial masyarakatnya masih kotor, seperti Polisi tidak bisa santun di tengah masyarakat yang kurang ajar, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan yang disusul pergantian pimpinan negara berikutnya hingga lengsernya Gus Dur bukan merupakan pergantian Presiden biasa, tetapi merupakan perubahan dari suatu tatanan sosial politik ke tatanan yang lain. Dalam konteks perubahan tersebut, kita dapat mengatakan bahwa Polri sedang dihadapkan kepada lingkungan yang berubah secara mendasar, yaitu dari masyarakat yang *otoritarian*, dimana dominasi negara dan pemerintah sangat kuat menuju pada masyarakat kewarganegaraan.¹¹

Dalam situasi maupun kondisi apapun, Polri dituntut untuk menyadari dan memahami secara cepat membaca setiap perubahan dengan menyesuaikan tindakan serta langkahnya sesuai penekanan pada nilai-nilai baru masyarakatnya seperti demokratisasi, partisipasi, transparansi dan hak asasi manusia. Tugas pokok Polri menjadi ambivalen karena ditarik oleh berbagai kepentingan satu sisi sebagai aparat negara yang dituntut menjaga kewibawaan negara dan sisi lain sebagai Polisi rakyat yang wajib mengamankan kehendak rakyat walaupun terkadang berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

Bertumpuk persoalan, baik internal maupun eksternal tengah membebani Kepolisian Republik Indonesia. Masalah eksternal berkenaan dengan kondisi lingkungan global maupun kondisi negara yang belum stabil serta berhadapan dengan sejumlah masyarakat yang masih berada dalam dunia mispersepsi akan makna demokrasi (yang diterjemahkan sebagai kebebasan sebesar-besarnya dan kalau mungkin tanpa batas). Masalah-masalah tersebut selain merupakan PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan juga merupakan batu ujian dan tantangan yang harus dituntaskan demi memperbaiki raport merah Polisi yang masih terpuruk nilai dan citranya di masyarakat.

Sejumlah masalah internal yang tidak kalah pentingnya dalam kinerja Kepolisian berkenaan dengan hal di bawah ini, misalnya: SDM (sumber daya manusia) yang masih belum seluruhnya profesional, suatu kondisi yang tidak terlepas dari sistem manajemen rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi yang belum didasarkan secara mata pada kualitas, sistem kompensasi atau

pengkajian yang jauh dari *sufficient*, dengan berbagai implikasinya termasuk resiko pada pelaksanaan tugas mereka, hal ini kemudian dijadikan pembenaran bagi penyimpangan yang terjadi, mekanisme sistem pengawasan yang belum sempurna, telah menimbulkan tingginya tingkat penyimpangan di Kepolisian. Kinerja Kepolisian seringkali dikeluhkan karena masih belum banyaknya dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai dan seringkali dijadikan alasan atas kinerja yang kurang baik, ketentuan sistem perundang-undangan yang masih rancu mengenai fungsi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana tertentu yang berakibat dapat menimbulkan masalah antara lembaga Kepolisian dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Kepolisian di seluruh dunia, disamping mengemban fungsi *repressif*, yang lebih penting adalah fungsi-fungsi *preventif* dan *preemptif*. Di bidang *preventif* dan *preemptif* inilah minat dan partisipasi pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dunia usaha, sekolah, orang tua dan anggota masyarakat sangat dibutuhkan. Kepolisian dunia mengembangkan konsep komunitas, perkuatan aparat penegak hukum tak akan mampu mengurus semua urusan yang menjadi koridor tugasnya. Kejahatan maupun kekerasan, menurut seorang pejabat PBB Franz Vander Schuren, bukanlah merupakan fenomena spontan tapi karena kesenjangan dan kondisi sosial lainnya. Di bidang *preventif*, rakyat akan merasa aman, karena patroli Polisi ada dimana-mana. Rakyat dapat bertanya dan meminta bantuan Polisi mengenai masalah apa saja yang dihadapinya. Walaupun jumlah Polisi telah mencapai ratio 1: 500 sekalipun, dalam bidang

Apabila pejabat tersebut didukung oleh komitmen bawahannya yang loyal dan berdedikasi benar, serta ditunjang oleh adanya dukungan masyarakatnya, maka kontrak kerja tersebut dilakukan dengan prediksi bahwa hasilnya akan sesuai. Adalah sangat ideal kalau kontrak kerja tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi kesatuan serta keadaan masyarakatnya. Sebab tidak semua daerah akan sama karakteristiknya. Polisi sebagai produk dari masyarakat, sepatutnya dapat membuka diri dan siap untuk dikritik dan diawasi oleh masyarakatnya. Demikian pula dengan masyarakatnya agar seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya. Hukum yang ada wajib untuk ditaati bersama, sedangkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari Polisi wajib dipenuhi, akan lebih berarti lagi kalau diantara Polisi dan masyarakatnya terjalin kerjasama dalam memenuhi hak dan kewajibannya tersebut.

Adapun penelitian tersebut dilakukan pada Kepolisian Resort Sleman dikarenakan banyaknya kejadian tindak kriminal atau pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Sleman. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tersebut, pada Kepolisian Resort Sleman sebagai upaya untuk mengetahui kinerja Kepolisian Resort Sleman dalam menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut dan sekaligus untuk menambah wawasan bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang kinerja Kepolisian Resort Sleman.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahnya sebagai berikut :

"Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Resort Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2005-2006"?

C. Kerangka Dasar Teori

1. Persepsi

Dalam realitas masyarakat sikap seseorang akan dipengaruhi oleh persepsinya, sikap seseorang baru akan tampak pada perilaku dalam kegiatannya. Adanya persepsi masyarakat yang mengarah pada bagaimana kinerja Kepolisian Yogyakarta Negara Republik Indonesia itu maka perlu diketahui tentang pengertian dari persepsi masyarakat mengenai Kepolisian khususnya Kepolisian Resort Sleman. Persepsi masyarakat tentang mekanisme pelaksanaan kinerja Kepolisian Sleman akan berpengaruh terhadap penentuan dari sikap masyarakat didalam berpartisipasi.

Dalam menjalankan agenda kerjanya pihak Kepolisian di dalam lingkungan masyarakat perlu adanya keikutsertaan partisipasi masyarakat tersebut dimana Kepolisian itu berdiri. Maka dari itu persepsi masyarakat menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat Kepolisian tidak bisa berjalan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat

Karakteristik dari orang-orang yang dilihat atau dinilai dalam proses persepsi sosial adalah :

Status orang yang akan dinilai tersebut mempunyai pengaruh yang besar bagi persepsi orang yang menilai, orang yang dinilai ditempatkan dalam kategori tertentu untuk memudahkan pandangan-pandangan orang yang menilai dan biasanya kategori tersebut terdiri dari status dan peranan, sifat peragai orang-orang yang akan dinilai memberikan pengaruh yang besar terhadap persepsi orang lain terhadap dirinya atau suatu badan tertentu.

Menurut M.D.J Al-Barry, et. al:

“Persepsi adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan kesatuan, hal mengetahui melalui panca indera.”¹³

Menurut kamus sosiologi, macam-macam persepsi yaitu:¹⁴

a. Persepsi (*perception*)

Yaitu sensasi atau interpretasi

b. *Perception, asocial*

Yaitu persepsi yang tidak terkondisikan secara social (persepsi asosial)

c. *Perception, genealogical*

Yaitu pengakuan dan peringatan terhadap kerabat-kerabat (persepsi genealogis)

¹³ M.D.J, Al- Barry, at. al, *Kamus Peristilahan Modern dan Populer*(Surabaya: Indah, 1996) hal. 332.

d. Perception, social

Yaitu kondisi-kondisi yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain (persepsi sosial)

e. Perception, sociometric

Yaitu persepsi dari anggota suatu kelompok tentang kedudukan sosiometri diri sendiri atau terhadap diri orang lain (persepsi sosiometrik)

f. Perception, subliminal

Yaitu persepsi dibawah sadar atau dibawah batas kesadaran (persepsi subliminal)

Menurut kamus bahasa Indonesia kontemporer :¹⁵

- a. Persepsi ialah pandangan dari seorang atau banyak orang akan hal atau peristiwa yang di dapat atau diterima.
- b. Persepsi yaitu proses diketahuinya suatu hal pada seseorang melalui panca indera yang dimiliki.

Menurut Miftah Thoha tentang persepsi:

”Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.”¹⁶

¹⁵ Salim, Peter, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta :Modern English Press,2002) hal. 1146

¹⁶ Miftah Thoha, *Persepsi dan Komunikasi* (Jakarta :CV Rajawali, 1994) hal. 20

Menurut Bimo Warsito:

“Persepsi merupakan proses pengorganisasian terhadap stimulasi yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas yang integral dalam diri individu”.¹⁷

Kecenderungan sikap seseorang untuk memberikan reaksi terhadap suatu akan diwujudkan dalam tindakan atau perilaku, dimana hal tersebut merupakan hasil (proses orientasi subyektif masyarakat terhadap obyek atau stimulus tertentu). Dalam kenyataannya sikap seseorang dipengaruhi oleh persepsinya. Sehubungan dengan persepsi seseorang terhadap obyek tertentu, maka Theodore M. New Comb mengemukakan bahwa :

*“Persepsi tentang sesuatu yang menyangkut proses transaksional antara si perseptor dengan obyek persepsinya, subyek itu melakukan sesuatu terhadap obyek. Proses transaksional tersebut berada pada taraf psikologis. Kalau hanya sekedar proses persepsi suatu tidak menimbulkan suatu perubahan yang sungguh-sungguh didalamnya, akan tetapi perjanjian perseptor tentang hal itu dipengaruhi oleh proses perceptual sendiri dalam arti ia berbuat sesuatu tidak terhadap sesuatu obyek.”*¹⁸

Sedangkan menurut Kamus Sosiologi :

“Persepsi diartikan sebagai kondisi yang dapat memahami terhadap suatu obyek tertentu”.¹⁹

Selanjutnya Hogam dan Herman mengatakan bahwa:

“Persepsi adalah sebagai proses melalui kesadaran kita terhadap lingkungan, yaitu dengan seleksi, menyusun kedalam pikiran dan interpretasi fakta-fakta indera kita.”²⁰

¹⁷ Warsito, Bimo, *Psikologi social suatu pengantar* (Yogyakarta : Andi offset, 1991) hal.54.

¹⁸ Theodore m, Newcomb, *Psikologi social* (Bandung : Cv. Diponegoro, 1985) hal.208.

¹⁹ Soekamto , Soerjono, *Kamus Sosiologi*, (Cv. Rajawali,1993) hal. 364.

²⁰ Soekamto , Soerjono, *Kamus Sosiologi*, (Cv. Rajawali,1993) hal. 364.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah merupakan proses mental individu di dalam memberikan pandangannya terhadap suatu hal atau obyek, sehingga menghasilkan sikap tertentu dalam diri individu yang bersangkutan, karena sikap individu akan memberikan arti tertentu. Pada lingkungan maka individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Agar terjadi persepsi harus ada hal-hal yang tercakup dalam proses persepsi itu sendiri yaitu :

- a. Obyek atau sasaran yang diamati.
- b. Alat indera yang cukup baik untuk menangkap obyek.
- c. Perhatian, dalam hal ini merupakan persiapan dalam mengadakan pengamatan.

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa dalam memahami sesuatu obyek yang terdapat didalam lingkungan, setiap individu mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Lewat perangkat pancaindera seseorang itulah yang kemudian diolah oleh pikiran yang akan melahirkan persepsi tentang sesuatu.

Jadi persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap obyek-obyek atau kejadian yang ada disekelilingnya, pandangan yang dipengaruhi oleh lingkungannya, pengalaman, kepentingan dan pengetahuannya. Hal ini berarti setiap orang mempunyai perbedaan satu sama lain dalam

Dalam kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kinerja Kepolisian Resort Sleman maka masyarakat akan memberikan tanggapan terhadap mekanisme kerja apabila mereka melihat dan merasakan proses kerja dari pihak Kepolisian tersebut.

Persepsi tersebut turut mempengaruhi sikap mereka yaitu masyarakat untuk beradaptasi. Fakta-fakta yang ada seperti partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungannya misalnya ada orang-orang yang mencurigakan ingin melakukan tindak kejahatan (mencuri) maka masyarakat yang melihat tersebut akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian agar ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara republik indonesia. Dengan demikian masyarakat akan ikut serta dalam pelaksanaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan, karena mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kenyamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat yang ia tinggali.

2. Masyarakat

Suatu masyarakat sebenarnya merupakan sistem adaptif, oleh karena itu masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi pelbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan. Namun disamping itu, masyarakat sendiri juga mempunyai pelbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, agar masyarakat itu dapat hidup terus. Setiap masyarakat mempunyai komponen-komponen yakni :²¹

²¹ *Geografi Suatu Pendekatan dan Deskripsi* (Dr. Boji Cahyadi, Remaja, 2005), hal. 26-27

a. Populasi

Yakni suatu masyarakat yang dilihat dari sudut pandang kolektif. Secara aspek-aspek sosiologis yang perlu dipertimbangkan dalam masyarakat adalah:

- 1) Aspek–aspek genetik yang konstan.
- 2) Variabel–variabel genetik
- 3) Variabel–variabel demografis

b. Kebudayaan

Yakni hasil karya, cipta dan rasa dari kehidupan bersama yang mencakup :

- 1) Sistem lambang–lambang
- 2) Informasi

c. Hasil–hasil kebudayaan material

d. Organisasi sosial

Yakni jaringan hubungan antar masyarakat yang bersangkutan, antara lain mencakup :

- 1) Warga masyarakat secara individual
- 2) Peranan–peranan
- 3) Kelompok–kelompok sosial

e. Lembaga-lembaga sosial dan sistemnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa masyarakat senantiasa merupakan suatu sistem,

di dalamnya mencakup seluruh hubungan dan yang saling berkaitan

Menurut Mac Iver and Page:

*" Masyarakat yaitu suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah-ubah. "*²²

Menurut Ralph Linton :

*" Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. "*²³

Menurut Selo Soemardjan :

*"Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan."*²⁴

Menurut kamus bahasa indonesia kontemporer :

*"Masyarakat ialah sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat, terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama ."*²⁵

Macam-macam masyarakat :²⁶

a. Masyarakat desa

Masyarakat desa yaitu masyarakat yang mata pencaharian utama penduduknya ialah bercocok tanam, beternak, memelihara ikan, atau

²² R.M .MacIver dan Page Charles H, *Society, An Introductory Analysis* (Mac -Milan dan Co.Ltd, 1961) Hal. 5.

²³ Linton ,Ralph, *The Study of Man an Introduction*, edisi Pelajar (New York: Applleton Century Croft Inc., 1936) Hal .91.

²⁴ Dalam *Kuliah - Kuliah Pengantar Sosiologi* Pada Fakultas Hukum dan Fakultas L.P.K , Universitas Indonesia Tahun Akademis 1968

gabungan dari keseluruhannya itu, dan memiliki sistem sosial dan budaya yang mendukung mata pencaharian tersebut.

b. Masyarakat kota

Masyarakat kota yaitu masyarakat yang penduduknya bermata pencaharian dalam sektor industri, perdagangan, atau administrasi pemerintah.

c. Masyarakat majemuk

Masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang terbagi dalam kelompok-kelompok, yang biasanya memiliki kebudayaan yang berbeda.

d. Masyarakat modern

Masyarakat modern yaitu masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas. Yang terfokus dalam bidang industri dan penggunaan teknologi canggih.

e. Masyarakat primitif

Masyarakat primitif yaitu masyarakat yang memiliki sistem hidup dan ekonomi yang sederhana.

f. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional yaitu masyarakat yang lebih didominasi oleh adat istiadat yang lama.

Masyarakat utama mempunyai dua arti :²⁷

- a. Sebagai "model masyarakat" yang dapat dipakai sebagai acuan yang mendukung kekuatan analitik.
-

- b. Sebagai model yang lebih baik, berkembang dan memiliki sejumlah kualitas tertentu yang dipetik dari unsur-unsur masyarakat yang lebih maju.

Dalam arti kedua ini, dapat diketengahkan model teoritis tentang "masyarakat sipil" untuk memahami apa yang dimaksud dengan "masyarakat utama". Dalam konsep lama, masyarakat sipil didukung oleh golongan borjuis atau kelompok kapitalis. Dalam konsep baru, masyarakat sipil memerlukan apa yang disebut "golongan menengah baru" yang terdiri dari para kaum cendekiawan, profesional, dan budayawan yang mampu bersikap independen. Menurut Al-Quran, "masyarakat utama" adalah masyarakat beriman yang memiliki sistem kelembagaan yang mampu berfungsi menegakan yang baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah yang buruk (*nahi munkar*) dan berorientasi pada nilai-nilai keutamaan (*alkhair*), masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang mampu mengatur dirinya sendiri tanpa banyak tekanan-tekanan dan pengaturan dari lembaga politik pemaksa (*coersive*) eksternal, yang sering kali mempergunakan kekerasan (*violence*).

Menurut Notting Ham golongan masyarakat terbagi menjadi :²⁸

- a. Golongan petani. Pada umumnya, golongan petani termasuk masyarakat yang terbelakang. Lokasinya berada didaerah terisolasi, sistem masyarakat masih sederhana, lembaga sosialnyapun belum banyak berkembang. Mata pencahariannya tergantung pada alam.

²⁸ M. M. D. ... (2000) : 120-126

- b. Golongan nelayan. Karakter pekerja golongan nelayan hampir sama dengan karakter golongan petani, mata pencahariannya bergantung pada keramahan alam.
- c. Golongan pengrajin dan pedagang kecil. Golongan ini hidup dalam situasi yang berbeda dengan golongan petani. Hidup mereka didasarkan atas landasan ekonomi yang memerlukan perhitungan rasional. Mereka tidak menyandarkan diri pada keramahan alam yang tidak bisa dipastikan, tetapi lebih mempercayai perencanaan yang teliti dan pengarahannya yang pasti.
- d. Golongan pedagang besar. Pada umumnya golongan ini merupakan jiwa yang jauh dari gagasan tentang imbalan jasa (*compensation*) moral, seperti yang dimiliki golongan tingkat menengah bawah. Mereka lebih berorientasi pada kehidupan duniawi dan cenderung menutup agama profetis dan etis.
- e. Golongan karyawan, golongan ini dapat dimasukkan pada masyarakat industri, karena sistem sosial yang sudah ada bersifat modern. Hal ini dilihat dari pembagian fungsi-fungsi kerja yang sudah jelas dan ada penyelesaian suatu masalah kemanusiaan berdasarkan penalaran dan efisiensi.
- f. Golongan buruh ialah mereka yang bekerja dalam industri atau perusahaan-perusahaan modern. Berdasarkan pengamatan Karl Marx, golongan buruh termasuk kelas proletar yang tidak diikuti sertakan dalam kehidupan masyarakat disingkirkan dari sistem sosial yang

berlaku. Mereka dijadikan sapi perahan untuk meraup keuntungan yang sangat besar oleh kaum borjuis.

- g. Golongan tua–muda, meskipun secara sosial penggolongan tua muda ini ada, tetapi susah ditentukan batasannya secara praktis. Kesulitan ini akhirnya mengimbas pada pernyataan tingkat pengaruh pada masing–masing golongan.
- h. Golongan pria–wanita, secara psikologis dalam menghadapi suatu keadaan, watak pria lebih dominan menggunakan pertimbangan rasional, sedangkan wanita lebih dominan pertimbangan rasa atau emosinya.

Tipe –tipe kelompok sosial :²⁹

a. *In group*

In group adalah kelompok sosial dimana individu mengidentifikasikan dirinya

b. *Out group*

Out group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in groupnya.

c. Kelompok primer (*primary group*)

Merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, dimana anggota – anggotanya saling mengenal, dimana ada kerja sama yang erat.

d. Kelompok sekunder (*secondary group*)

Secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng.

e. Paguyuban (*gemeinschaft*)

Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama, dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan.

f. Patembayan (*gesellschaft*)

Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka.

g. *Formal group*

Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya.

h. *Informal group*

Tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan - pertemuan yang berulang kali, yang menjadi dasar bertemunya kepentingan, kepentingan dan pengalaman, pengalaman yang sama

i. *Membership group*

Merupakan suatu kelompok dimana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut.

j. *Reference group*

Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk perilaku dan pribadinya.

k. Kerumunan (*crowd*)

Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan disuatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan.

l. Masyarakat setempat (*community*)

Menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar diantara anggota, dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk diluar batas wilayahnya.

m. *Small group*

Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit dari dua orang, dimana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang dianggap hubungan itu sendiri penting baginya.

Menurut Inkeles dan Smith mengemukakan bahwa akan ada akibat

pandang hidup seseorang, sedangkan masyarakat modern menurut mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terbuka terhadap pengalaman baru. Artinya selalu berkeinginan mencari atau menemukan sesuatu yang baru.
- b. Semakin tidak tergantung (*independent*) kepada berbagai bentuk kekuasaan tradisional seperti suku, raja dan sebagainya.
- c. Percaya kepada ilmu pengetahuan dan kemampuannya menaklukkan alam.
- d. Berorientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi. Memiliki hasrat untuk meniti tangga karir dan prestasi.
- e. Memiliki rencana jangka panjang. Selalu merencanakan sesuatu jauh didepan dan memikirkan apa yang akan dicapainya misalnya lima tahun yang akan datang.
- f. Aktif dalam percaturan politik. Tergabung dalam berbagai organisasi yang bersifat kekeluargaan maupun yang lebih luas. Berpartisipasi dalam urusan masyarakat setempat.³⁰

3. Kinerja Organisasi³¹

Dalam bahasa inggris pada kata untuk istilah kinerja yaitu "performance" menurut *The Scribner Batam Dictionary, 1979*, kinerja berasal dari kata "to performance" yang mempunyai beberapa istilah "entries" sebagai berikut :

- a. Melakukan, menjalankan, melaksanakan.

³⁰ Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 120-121

³¹ Suardi Dewanto, *Kebijakan Kinerja Keuangan BPEF Yogyakarta*, 1999, hal. 2

- b. Memenuhi atau menjalankan kewajiban dalam suatu permainan.
- c. Menggambarkan dengan sarana atau alat musik.
- d. Melaksanakan dengan sarana alat musik.
- e. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab.
- f. Melakukan usaha kegiatan dalam suatu permainan.
- g. Memainkan (pertunjukan musik)
- h. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.

Dalam kaitannya dengan kinerja, maka "entries" yang paling tepat adalah a,b,c, sampai h, yakni melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Menurut Suyudi Prawira Sentana yaitu :

"Perfomance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma maupun etika." ³²

Jadi pengertian kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam suatu organisasi terdapat suatu tim yang diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. King (dalam Goetsen dan Davis) menganjurkan strategi yang disebut sepuluh perintah tim (*ten team commando ments*) untuk meningkatkan kinerja setiap tim dalam rangka pencapaian tujuan organisasi antara lain :

a. Saling ketergantungan

Saling ketergantungan diperlukan diantara para anggota tim dalam hal informasi, sumber daya pelaksanaan tugas dan dukungan, adanya saling ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim

b. Perluasan tugas

Setiap tim harus diberi tantangan karena reaksi atau tanggap tersebut akan membentuk semangat persatuan (*esprit de corps*) kebanggaan dan kesatuan tim.

c. Pengajaran (*alignment*)

Anggota tim harus mampu menyingkirkan setiap individualisme dalam rangka mencapai misi tertentu.

d. Bahasa yang umum

Pimpinan tim harus mengusahakan penggunaan bahasa umum, karena biasanya anggota tim berasal dari departement yang berbeda (pemasaran, produksi, personalia, keuangan, riset, dan pengembangan dan sebagainya) yang memiliki perbendaharaan kata (istilah teknis/angan sendiri).

e. Kepercayaan/respek

Dibutuhkan waktu dan usaha untuk membentuk kepercayaan dan respek agar setiap anggota tim dapat bekerjasama.

f. Kepemimpinan / keanakbuahan yang dibagi rata

Setiap individu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda, oleh karena itu pemimpin yang baik harus dapat memperhatikan bakat

tertentu setiap anggota tim, sehingga kepemimpinan dan keanakbuahan dapat dibagi bersama.

g. Ketrampilan pemecahan masalah

Tim harus banyak menggunakan waktu untuk membina kemampuan anggota dalam memecahkan masalah karena masalah merupakan hal yang selalu dihadapi setiap organisasi.

h. Ketrampilan menangani konfrontasi /konflik

Dalam lingkungan kerja yang *high pressure* dan kompetitif, konflik merupakan hal yang tak terelakan, perbedaan pendapat (ide, masalah, dan pemecahan masalah) dan penyampaian ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain yang bersangkutan.

i. Penilaian tindakan.

Penilaian dilakukan dengan memantau dan membandingkan apa yang telah dilakukan dengan pernyataan misi dan rencana tindakan yang ada, rencana tindakan berisi tujuan, sasaran jangka waktu dan penugasan serta tanggung jawab setiap anggota.

j. Perayaan

Kesuksesan yang ingin dicapai suatu sistem yang efektif dapat diperkuat dengan jalan merayakannya. Penghargaan dan pengakuan atas tugas yang terlaksana dengan baik akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat dan terampil dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, maka kunci pokok keberhasilan kerja sama tim terletak pada harmonisasi dan kolaborasi antara individu tim dan organisasi alam mewujudkan tujuan dan harapan yang sama. Adapun semua pihak dituntut untuk dapat menjalin hubungan yang sinergis dan mutualis yang semuanya dapat digambarkan melalui kepanjangan dari kata team yaitu " *together every one achieves more* ".

Jadi pengertian kinerja adalah usaha yang dicapai oleh seseorang yang diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Kinerja dan prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:³³

a. Aspek produktifitas (*productivity*)

Perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) apabila keluaran atau hasilnya lebih besar dari pada masukan atau ongkosnya maka kondisi ini disebut efisien.

b. Aspek kualitas (*quality of service*)

Merupakan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi menyangkut aspek *quality of service*.

c. Responsivitas (*responsiveness*)

Merupakan kebutuhan sistem itu sendiri, sedangkan dari suatu kerjasama dalam suatu sistem (antar individu) adalah hasil gabungan efisien dan upaya yang dipilih masing-masing individu. Sehingga efektivitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah tujuan

³³ Utami Rahadi, *Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi Publik* UINM, 2002

kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya dapat mencapai tujuan. Bila pengorbanannya terlalu besar dapat dikatakan tidak efisien.

d. Responsibilitas

Dalam organisasi yang baik, wewenang dan tanggung jawab telah dilakukan dengan baik pula, antara wewenang dan tanggung jawab jangan sampai tumpang tindih, tugas masing-masing mengetahui apa yang menjadi haknya dan tanggung jawab dalam rangka organisasi mencapai tujuan kejelasan wewenang kinerja organisasi tersebut.

e. Disiplin (disciplin)

Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan karyawan. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang berlaku kepada atasan dimana disiplin tersebut akan memberikan corak terhadap kinerja organisasi.

Aspek disiplin merupakan bagian yang penting dalam kinerja suatu organisasi supaya organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan organisasi yang ingin dicapai.

4. Organisasi Polri

a. Kedudukan Organisasi Polri

Polisi sebagai aparat pemerintahan, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintahan. Organisasi polisi adalah bagian dari organisasi pemerintahan. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah

yang bersangkutan terhadap tugas Polisinya. Kedudukan organisasi Polisi yang ditentukan oleh visi pemerintahan itu lalu menentukan bentuk struktur, tata cara kerja, kinerja maupun fungsi dan perannya, yang lalu menentukan pula perilaku oganisasinya.³⁴

b. Pendekatan Sejarah

Pengertian Polisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu POLITEA, perkataan ini pada mulanya dipergunakan hanya untuk sekedar untuk menyebut orang-orang yang menjadi warga dari Negara kota Athena yang berarti semua usaha dan kegiatan Negara termasuk kegiatan agama. Karena perkembangan luas maka urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak dan diperlukan pengamatan secara khusus, sehingga urusan atau kegiatan keagamaan dikeluarkan dari usaha *Politea*. Pada abad ke 14 dan 15 di Perancis dan Jerman kata *Polizea* dan pengertian kata-kata itu dikeluarkan urusan keagamaan dari usaha *Politea*, sedangkan di Inggris kata *Politea*, di Belanda dengan kata *Politea* dan di Indonesia dengan kata *Polisi*³⁵.

Dengan demikian istilah Polisi (*Polizea*) dalam arti formal, mencakup tentang penjelasan organisasi dan kedudukan dari pada instasi Kepolisian. Sedang Polisi dalam arti materiil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tentang tugas dan wewenangnya dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan Kepolisian umum maupun Kepolisian khusus. Polisi

³⁴ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri* (Jakarta: Pt. Cipta Manunggal, 2001)hal 108

sangatlah penting perannya dan diperlukan sekali adanya, untuk menegakan aturan hukum, karena itu anggota Polisi selalu dituntut peka terhadap tugas dan wewenangnya, oleh karena itu Polisi harus penuh kasih sayang terhadap masyarakat, khususnya mereka yang tertindas dan terinjak-injak harkat martabat sebagai manusia.

Dengan tugas yang tidak mudah itu, maka tidaklah gampang memilih seseorang sebagai sosok profesi Polisi, karena harus dalam lubuk hatinya sudah tertanam jiwa yang mau berkorban dengan ikhlas.

Pengertian Polisi ini selalu berubah-ubah dari masa ke masa menurut perkembangan sifat dan bentuk Negara serta pemerintahan, dikalangan sarjanapun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas Polisi, seperti dikatakan KIST:

“Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi Negara, alat Negara, demi kelancaran roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.”³⁶

Dalam sejarah Polri ada dua momentum reformasi penting yang ingin dinamakan “reformasi 1945” dan reformasi 1999. Kedua reformasi tersebut dapat dilihat sebagai pencarian ruang kebebasan, yang pertama pada tanggal 1 Juli 1946, Kepolisian Indonesia dikeluarkan dari kementerian dalam negeri dan ditempatkan pada kantor Perdana Menteri. Sejak itu tanggal tersebut diperingati sebagai hari kelahiran Polri, maka ia boleh menjadi bukti tentang kehadiran dari psikologi kebebasan tersebut di

³⁶ Momo Kelana dan Joko Prasojo, *Polisi Sebagai Pemalidik dalam Penerapan Hukum* / Jakarta

- 1). Nama lambang tertulis jelas: Sastra Sewakottama, Polisi adalah abdi utama dari nusa dan bangsa. Seorang abdi akan melakukan kesalahan besar kalau bersikap sebagai penguasa.
- 2). Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara.
- 3).Tiang dan nyala obor, penegasan bahwa tugas Polisi di samping sebagai penerang bagi rakyat, juga bermakna penyadaran hati nurani rakyat agar selalu sadar akan pentingnya kondisi kamtibmas yang mantap.
- 4). Pancaran obor=17 dengan 8 sudut berlapis tiang 4 dan 5, bermakna Polri berperan langsung pada proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tidak pernah lepas dari perjuangan Bangsa dan Negara.
- 5). Tangkai padi dan kapas adalah gambaran cita-cita bangsa yang adil dan makmur dimana Polri harus berupaya ikut mewujudkan cita-cita Bangsa tersebut.
- 6). Tiga bintang diatas lambang dari Tri Brata, pedoman hidup seseorang Polisi dan Polri keseluruhan.
- 7). Warna kuning emas, lambang kebesaran jiwa dan keagungan hati nurani segenap prajurit Polri.
- 8). Warna hitam sebagai dasar dan latar belakang, bermakna lambang keabadian pengabdian dan sikap tenang dan mantap yang bermakna pula harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun. Tenang memiliki integritas pribadi yang tinggi dan prima agar

selalu berpikir jernih, bersih dan selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Tugas *represif* adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHP, sehingga asasnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum.

Tugas preventif adalah tugas yang luas hampir tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Dengan begitu pada tugas ini yang digunakan adalah asas *Oportunitas*, *Utilitas* dan asas Kewajiban.

Pengertian dan tugas Polisi mencakup:³⁹

- 1) Polisi adalah alat penegak hukum yang tugasnya memelihara keamanan di dalam negeri.
- 2) Polisi sebagai pemelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban umum.
- 3) Polisi sebagai pembina ketertiban masyarakat.
- 4) Polisi sebagai pengawas dan pengendalian masyarakat.
- 5) Polisi memberi pelayanan, keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- 6) Polisi membudayakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap norma kesusilaan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

d. Pengorganisasian Tugas Polri

Dengan pendekatan dari segi kedudukan organisasi, sejarah pelaksanaan tugas dan keberhasilannya maka pengorganisasian Polri itu memang harus ditegakkan atas dasar prinsip khas Polisi antara lain :⁴⁰

1). Refungsionalisasi

Menonjolkan kekhasan berarti harus melakukan refungsionalisasi yang berciri khas matra kamtibmas. Sedang fungsi-fungsi yang bersifat politis dan strategis dipusatkan di satu tangan di tingkat PANGAB. Fungsi-fungsi yang bersifat umum berlaku lebih dari 1 angkatan diatur dan dibina dengan sistem pembinaan terpusat. Sedang fungsi khas angkatan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing angkatan Polri.

2). Asas Organisasi, Pengorganisasian harus didasari prinsip-prinsip:

- a) Sederhana dalam arti berkemampuan cukup untuk mencapai tujuan.
- b) Lebih efektif sehingga dapat dicapai keseimbangan antara tugas dan kemampuan anggaran.
- c) Lebih efisien dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran dengan biaya yang sama dapat terlaksana secara lebih cepat dan baik.

3). Bentuk Organisasi, Tipe Staf

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan organisasi adalah

- a) Bentuk organisasi yang digunakan: *Line and Staff*
- b) Tipe staf yang dipakai adalah staf umum
- c) Penyusunan satuan besar dibagi 2 tingkat:
 - Tingkat Mabes Angkatan/POLRI sebagai bagian dari HANKAM/ABRI
 - Tingkat Kotama
- d) Garis besar pengelompokkan badan-badan dibedakan dengan eselon:
 - 1. Eselon pimpinan
 - 2. Eselon staf
 - 3. Eselon pembinaan
 - 4. Eselon pelaksana pusat

e. Kepemimpinan Dalam Organisasi Polri

1). Sumber kepemimpinan di Polri

Sumber kepemimpinan di Polri adalah falsafah bangsa Pancasila. Kesimpulan ini dipertegas dengan ketetapan MPR No. II/MPR/1978, tanggal 22 Maret 1979 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Panca Karsa dan banyak dikenal dengan istilah P4. Derivasi Pancasila itu ditingkat standar ABRI dan POLRI wajib mempedomani prinsip-prinsip: "SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT, TRI BRATA, CATUR PRASETYA dan wajib-wajib lain serta berbagai kode etik".⁴¹

⁴¹ Ibid., hal 122

Tabel 1. 1 Dasar Jenjang Kepemimpinan POLRI

Piramida dan penjenjangan	Dasar-dasar Kepemimpinan	Level/lapis pemikiran	Kepangkatan
Falsafah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembukaan UUD 1945 ▪ Lambang Negara ▪ Lagu kebangsaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Negara ▪ Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Negarawan ▪ Pati ABRI
Standard	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sapta Marga ▪ Sumpah Prajurit ▪ 11 Azaz kepemimpinan ▪ dll 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dep. Hankam ▪ Mabes ABRI ▪ Mabes Polri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pati ABRI (Lingkup Nasional)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tribrata ▪ Catur Prasetya ▪ dll 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mabes Polri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pati ABRI (Lingkup Nasional)
Metode	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berbagai pola operasi ▪ Berbagai kebijaksanaan ▪ Sistem perencanaan ▪ dll 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mabes Polri ▪ Mapolda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pati/Pamerpol (Lingkungan Nasional/Daerah)
Teknis Taktis Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juklap ▪ Juklak ▪ Juknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Staf Pelaksanaan Pusat ▪ Polda dibawah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pamen/Pamapol (Lingkungan Daerah Tingkat I ke bawah)

Semua mengandung dasar kepemimpinan yang berjenjang.⁴²

2). Tuntutan Mutu Kepemimpinan di Polri⁴³

a). Integritas pribadi pemimpin

Studi empiris mengatakan bahwa :

1. Inti dari suatu organisasi, termasuk organisasi Polri adalah kualitas pemimpinnya.
2. Inti dari kualitas pemimpin adalah kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
3. Inti dari kemampuan mengambil keputusan adalah endapan ilmu pengetahuan dan endapan iman dan taqwa.

b). Kepemimpinan yang baik di Polri

Seorang pemimpin di Polri, karena harus membina, membimbing, mengayomi dan melayani masyarakat dan sekaligus para anak buah (pelaksana Polri) di lapangan, maka padanya dituntut kemampuan kepemimpinannya bersifat multi dimensional. Setiap anggota Polri sebenarnya adalah pemimpin di tengah masyarakat. Polisi apapun pangkatnya, seorang diri di tengah kegiatan masyarakat, dipasar, di jalan, di keramaian, dan di manapun ia berada, maka dia harus mampu bertindak menanggulangi pelanggaran hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban umum.

c). Aplikasi Kepemimpinan Polri

1. Pemberdayaan Pemimpin Polri⁴⁴

Dalam upaya untuk dapat selalu memelihara dan meningkatkan kualitas atau mutu kepemimpinan. Bukan hanya menunjang pelaksanaan tugasnya saja, namun juga untuk meniti jenjang karier, yang semakin tinggi pangkat dan kedudukannya berarti memerlukan kadar kepemimpinan yang harus semakin tinggi pula. Cakrawala pandang, wawasan dan profesionalisme yang harus semakin mantap dan semakin berbobot, karenanya internalisasi kepemimpinan harus semakin intens.

Kriteria keberhasilan pimpinan polri :

- a. Kehadirannya memberikan getaran perbaikan
- b. Menciptakan prestasi dan produk kerja yang diakui positif
- c. Selalu dapat memecahkan masalah khusus
- d. Menciptakan suasana akrab dan harmonis
- e. Memahami medan, mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan sikon
- f. Mampu mematok tekad pengabdian terbaik untuk mewujudkan hari esok
- g. Meski dalam keterbatasan dapat tetap berhasil

⁴⁴ Ibid.,hal 128-129

Kesemua kriteria ini akan menciptakan satuan Polri yang profesional, efektif, efisien, modern, bersih, berwibawa dan dicintai masyarakat.

Tabel 1. 2 Perilaku Kepemimpinan Polri⁴⁵

Perwira Polri	Seniman strateg	▪ Kea rif an	▪ Bercakrawal a luas dan komprehensi f dan jauh ke depan	▪ Matang matur kharism atik,arif bijaksan a	Kharisma : Pemimpin paripurna tak henti berjuang tak pernah mati profesional, gembira seialu etis perilakunya
	Praktisi	▪ Ke mam puan prof esio nal	▪ Trampil, tangguh, tanggap, tangan trengginas	▪ Aplikasi pengaru h leingkun gan taktical feding	
	Akadem is	▪ Ke mam puan intel ektu al	▪ Cerdik dan cendikiawan dalam berfikir	▪ Amal ilmiah, ilmu alamiah, ilmu yang jernih obyektif dan solid tidak memper sulit	

Tabel 1. 3 Perilaku Pemimpin Polri⁴⁶

Individu Pemimpin	Internalisasi kepemimpinan Ketrampilan/profesionalisme Physik yang prima/tangguh	Pimpinan Polri yang tangguh
--------------------------	--	-----------------------------

2. Pemberdayaan Masyarakat⁴⁷

Pemimpin yang tangguh itu pada gilirannya akan dimanfaatkan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas. Untuk itu yang terbaik adalah memberdayakan masyarakat yang mengarah terbentuknya individu masyarakat yang disebut *law abiding citizen* yang dalam semangat pelaksanaan tugas polisi di Indonesia mengandung unsur:

- a. Masyarakat yang sadar hukum
- b. Masyarakat yang patuh dan taat hukum
- c. Masyarakat yang memiliki daya tangkal yang tinggi maupun melawan setiap tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum

3. Pemberdayaan Satuan⁴⁸

Pemimpin yang tangguh juga harus mampu memberdayakan satuan kendalanya. Unsur-unsur yang mutlak harus dikendalikan, dibina dan dibangun kinerja yaitu :

- a. Pelaksanaan *manajerial*, dalam arti segenap sistem manajemen baik yang berkaitan operasional pembinaan maupun

D. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual yaitu merupakan suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual ini dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap pengertian atau batasan pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

Beberapa yang terkait dengan variabel penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pandangan seseorang terhadap kejadian yang ada disekelilingnya.
2. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial.
3. Kepolisian adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara.
4. Kinerja adalah usaha yang telah dicapai oleh suatu lembaga untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah penelitian yang memberitahukan cara mengukur suatu variabel, dengan indikator tertentu yaitu:

1. *Tangible* (wujud) indikator pengukuran kualitas pelayanan.
 - a. Penampakan fasilitas fisik
 - b. Penampakan peralatan

- c. Penampakan personalia
- 2. Aspek Produktivitas
 - a. Pelayanan cepat
 - b. Kepuasan masyarakat
- 3. *Reliability* (keandalan), indikatornya pengukuran kualitas pelayanan.
 - a. Kecepatan waktu
 - b. Kecepatan analisa dan Kecepatan pelayanan
- 4. Kemampuan (*ability*) indikatornya pengukuran kualitas pelayanan.
 - a. Ketrampilan petugas
 - b. Kemampuan petugas
 - c. Pengetahuan yang dimiliki
- 5. Aspek Responsibilitas
 - a. Dedikasi dan semangat kerja yang tinggi
 - b. Sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan
 - c. Pelayanan yang ramah.
- 6. Responsivitas (*Responsiveness*) indikatornya pengukuran pelayanan.
 - a. Sikap tanggap dari petugas terhadap berbagai keluhan, pengaduan, kritik dan saran.
 - b. Kesiapan pegawai bila diperlukan pelanggan.
 - c. Tingkat kepedulian
- 7. Aspek Akuntabilitas
 - a. Keterbukaan
 - b. Tanggung jawab

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Seperti yang di ungkapkan oleh Travers :⁴⁹

“Penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksakan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.”

Menurut Faisal Diskriptif Kualitatif adalah :⁵⁰

” Diskriptif Kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif (penggambaran) berupa fakta-fakta tertulis maupun lisan dari perilaku yang dicermati, dalam keadaan yang berlangsung secara wajar dan ilmiah dan bukan kondisi yang terkendali.”

2. Tempat Penelitian

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Istimewa Yogyakarta

Resort Sleman

Jalan. Bhayangkara Sleman 5514

3. Unit Analisa

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat maka yang menjadi unit analisa data penelitian ini adalah Polres Sleman (Wakapolres, Kabagmin, Kabagops, Kabag Binamitra, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba.

⁴⁹ Consuelo, Sevilla, et. al, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993) hal. 71.

⁵⁰ Faisal

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu:

a. Observasi (*Observation*)

Yaitu cara pengumpulan data mengenai keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung. Dengan membuat kunjungan lapangan.

b. Wawancara (*Interview*)

Pedoman pertanyaan di buat secara garis besar, kemudian akan berkembang lebih jauh di lapangan dan informasi lebih dalam.

Wawancara didapat dari:

Sumber Data Primer

Sumber Data primer diperoleh melalui wawancara dengan

- 1) Wakapolres
- 2) Kabagmin
- 3) Kabagops
- 4) Kabag Binamitra
- 5) Kasat Reskrim
- 6) Kasat Narkoba
- 7) Ka SPK

c. *Quesioner (Questionaire)*

Cara pengumpulan data yang dilakukan tersebut ialah dengan cara mengisi daftar pertanyaan mengenai konsep penelitian secara

tertulis kepada masyarakat Sleman khususnya yang berurusan secara langsung pada pihak Kepolisian Resort Sleman.

d. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Sumber datanya berupa: Dokumen resmi, arsip, media massa cetak, jurnal, literatur dan sumber sumber lain yang mendukung.

5. Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya dan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, dan waktu, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut sedangkan teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Dalam sebuah penelitian untuk menentukan sampel yang akan digunakan..⁵¹

Populasi dan sampel yang diambil antara lain :

- a. Pihak Kepolisian mengenai kinerja Kepolisian Resort Sleman Yogyakarta

b. Melakukan pertanyaan/Questioner pada masyarakat yang terlibat langsung atau berkepentingan pada pihak Kepolisian Resort Sleman

Pada penelitian ini penulis memakai teknik sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sample yang secara kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang ditemui tersebut dirasa cocok sebagai sumber data.⁵²

6. Teknik Analisis Kualitatif

Menurut Nasution analisa kualitatif yaitu :

"Pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran dan atas berbagai data yang diperoleh."⁵³

Menurut Soehadi dan Suwarno analisa kualitatif adalah :

"Analisa kualitatif yaitu analisa yang dilakukan pada penelitian kualitatif, analisa yang dilakukan secara rasional, logis dan sistematis, atas data kualitatif yang sudah matang kemudian dikelompok-kelompokan, dihubung-hubungkan, dibandingkan, dicari sifat-sifat yang dominan dan akhirnya menuju pada generalisasi. Apabila generalisasi ini dapat dilakukan maka generalisasi tersebut melengkapi/memperbaiki teori-teori lama dan bahkan menjadi teori baru."

Menurut penulis analisa kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan secara logis yang berupa fakta-fakta secara lisan dan tertulis, yang ada pada lingkungan penelitian.

⁵² Ibid.hal 77

⁵³ ...

preventif ini perlu keikutsertaan masyarakat yang di Indonesia disebut bentuk pengamanan swakarsa. Demikian pula dibidang *preemptif*, Polisi bekerja sama dengan pimpinan pemerintahan dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama membimbing masyarakat terutama anak-anak remaja dan pelajar agar menjadi *law abiding citizen*, menjauhi perilaku menyimpang dan membimbing mereka pada kegiatan konstruktif.¹²

Dalam konteks perubahan sosial sekarang hukum yang telah dianggap gagal mempersatukan semua komponen bangsa dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik, malah menjadi kambing hitam kemarahan masyarakat dan menimbulkan kecemburuan sosial yang luas. Kondisi demikian selain menurunkan moral juga menjadi prosedur yang buruk bagi upaya penegakan hukum oleh Polri. Iklim penegakan hukum akan lebih kukuh jika pihak Kepolisian didukung sepenuhnya oleh *Political Will* Pemerintah, seluruh komponen masyarakat bersama elemen penegak hukum lainnya. Segenap bangsa ini hendaknya saling bahu membahu, mengerti dan memahami, sehingga tidak ada lagi *psychological gap* antara Kepolisian dengan aparat penegak hukum lainnya. Jadi Kepolisian pada dasarnya bukanlah aparat keamanan belaka, tetapi institusi yang harus tampil dan mengurus apapun.

Apabila peran aktif warga masyarakat sudah terwujud, maka Polisi yang bertugas pun akan siap kontrak kerja dengan atasannya. Pejabat Polri yang didaulat untuk siap mengikat kontrak kerja sesuai kebijakan Kapolri selanjutnya dapat menganalisa dan mengevaluasi kinerjanya selama ini

administratif harus dapat terselenggara dengan tertib, lancar, efektif dan efisien serta semakin profesional dan modern.

- b. Pelaksanaan pelatihan yang bermakna melatih anggota satuan agar dapat selalu siap menghadapi tugas yang seberat apapun, siap siaga, siap diri dan siap operasional. Pelatihan juga bermakna melatih jiwa kepemimpinan unsur-unsur pimpinan pembantunya. Juga pelatihan pemberdayaan masyarakat.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana kelengkapan tugas secara memadai dalam arti jumlah dan kualitasnya mencukupi persyaratan.
- d. Peningkatan kesejahteraan dalam arti mendukung kebutuhan minimal sehingga membawa ketenangan dan unsur positif